

# TRANSPARASI ANGGARAN

Dalam konteks good governance transparansi merupakan kunci utama dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Transparansi merujuk pada pengertian bahwa masyarakat memiliki kemudahan untuk mengetahui serta memperoleh informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan aparatur Pemerintahan, baik yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Oleh karena itu, transparansi juga terkait dengan dokumen-dokumen serta proses pembuatan kebijakan, program dan kegiatan aparatur pemerintahan yang mengacu pada pelayanan publik. Seperti dalam proses dan dokumen perencanaan dan penganggaran

Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor. 188.45/669/2016 tentang pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Pada tahun anggaran 2017 sebagai berikut :

Belanja Tidak Langsung (BTL)	3,044,294,530.10
Belanja Langsung (BL)	5,292,171,060.50
<b>Total</b>	<b>8,336,465,590.60</b>